

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR.....i

ABSTRAK.....iv

ABSTRACT.....v

DAFTAR ISI.....vi-ix

DAFTAR TABEL.....x

DAFTAR GAMBAR.....xi

DAFTAR SINGKATAN.....xii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Permasalahan.....41

1.3 Tujuan Penelitian.....41

1.4 Manfaat Penelitian.....42

1.5 Keaslian Penelitian43

1.6 Sistematika Penulisan.....46

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	49
2.1.1 Teori Perjanjian.....	50
2.1.2 Teori Kepastian Hukum.....	67
2.1.3 Pendekatan Perse Illegal Dan Rule Of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha.....	80
2.2 Landaasan Konsepsional.....	95

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian.....	104
3.2 Pendekatan Penelitian.....	112
3.3 Data Penelitian.....	114
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	116
3.5 Metode Analisis Data.....	123
3.6 Hambatan Penelitian.....	129

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Mengenai Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dalam Kontrak Jasa Rig di Lingkungan Industri Migas di Indonesia.....	131
4.1.1 Pengaturan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri di lingkungan kegiatan Industri Migas di Indonesia	131

4.1.2	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Dalam Pengelolaan Migas di Indonesia.....	137
4.1.3	Asas dan Norma Perjanjian Dalam Penyusunan HPS	142
4.1.4	Landasan Pengaturan Operasional Dalam Penyusunan HPS.....	148
4.1.4.1	Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.....	148
4.1.4.2	Perubahan-perubahan Perpres No.35 Tahun 2009, Perpres No.70 Tahun 2012, Perpres No.172 Tahun 2014, Perpres No.4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/jasa.....	166
4.1.4.3	Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.....	174
4.1.4.4	Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.....	188
4.1.4.5	Perubahan Badan Pelaksana Migas (BP Migas), Menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).....	191
4.1.4.6	Pedoman Tata Kerja SKK Migas No.: PTK 007 Tahun 2009 Revisi 1, PTK 007 Tahun 2011 Revisi 2, PTK 007 Tahun 2015 Revisi 03 dan PTK 007 Tahun 2017 Revisi 04.....	196
4.1.5	Temuan Penelitian Yuridis Normatif.....	255
4.1.5.1	Inkonsistensi Regulasi Dalam Tahap Pra Kontraktual.....	255
4.1.5.2	Dampaknya dalam aspek Kepastian Hukum.....	267
4.2	Pelaksanaan Pengaturan Mengenai Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Dalam Kontrak Jasa Rig di Lingkungan Industri Migas di Indonesia.....	272
4.2.1	Implementasi Pengaturan mengenai Penyusunan Nilai HPS	272
4.2.2	Inkonsistensi Pelaksanaan Penawaran Nilai HPS.....	292
4.2.3	Penawaran Harga di bawah 80% dari Nilai HPS	301

4.2.4	Penerapan Preferensi TKDN dalam Evaluasi Pemenang Tender.	317
4.2.5	Perbandingan Penyusunan HPS/OE dari <i>Oil Company</i> , “ <i>Y</i> ” <i>Oil & Gas</i> dan “ <i>Q</i> ” <i>Petroleum (Oil Company)</i> .	323
4.2.6	Sistem Gross Split Dalam Pengadaan Barang/Jasa.	330
4.2.7	Temuan Penelitian Yuridis Empiris.	339
4.3.	Pengaturan Ideal Mengenai Penyusunan Harga Sendiri Dalam Kontrak Jasa Rig Di Lingkungan Industri Migas Di Indonesia.	351
4.3.1	Kebutuhan untuk merivisi Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021	351
4.3.1.1	Penguatan Aspek Kepastian Hukum Dalam Penyusunan Nilai HPS.	354
4.3.1.2	Konsep Penentuan Kewajaran Harga, Batas Tertinggi, Batas Bawah Dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri.	358
4.3.1.3	Penataan Kembali Prosedur Penawaran Nilai HPS Bersifat Tidak Rahasia.	368
4.3.2	Kebutuhan untuk mengubah Pengaturan dalam PTK 007 Revisi 04.	372
4.3.3	Penguatan peran lembaga SKK Migas dan KKKS terhadap Sanggahan Pada Awal Proses Penawaran Nilai HPS	391

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.	394
-----	-------------	-----

5.2	Saran.	396
-----	--------	-----

DAFTAR PUSTAKA.	399
------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.	414
------------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	418
--------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
2.1	Tabel Tentang Sifat Pelarangan Tindakan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU No.5 Tahun 1999	94



DAFTAR GAMBAR


Gambar	Keterangan	Halaman
1.1	Grafik Wilayah Kerja Migas 2018-2019	13
1.2	Grafik Produksi Minyak dan Gas Bumi Nasional 1966-2019	14
1.3	Grafik pengeboran sumur eksplorasi sumur eksploitasi, kerja ulang dan perawatan sumur 2019	25



DAFTAR SINGKATAN



AACE	:	American Association of Cost Engineer
AFE	:	Authorization For Expenditure
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APDN	:	Apresiasi Produk Dalam Negeri
APMI	:	Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia
BOPD	:	Barrel Oil Per Daya
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BP Migas	:	Badan Pelaksana Migas
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
GPA	:	Government Procurement Agreement
HPS/OE	:	Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate
HE-TKDN	:	Hasil Evaluasi -Tingkat Komponen Dalam Negeri
HP	:	Horse Power
HEP	:	Harga Evaluasi Penawaran
K/L/D/I	:	Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi
KKN	:	Korupsi Kolusi Nepotisme
KKS	:	Kontrak Kerja Sama



KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUH Perdata	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE	:	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Migas	:	Minyak dan Gas Bumi
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
ODR	:	Operation Daily Rate
PA	:	Pengguna Anggaran
PN Pertamina	:	Perusahaan Negara Pertamina
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PS	:	Per Se Illegal
PTK	:	Pedoman Tata Kerja
POD	:	Planning On Development
PSC	:	Production Sharing Contract
PT Pertamina	:	Perusahaan Terbatas Pertamina
RIA	:	Regulatory Impact Analysis
RR	:	Rule of Reason
SCM	:	Supply Chain Management
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDM	:	Sumber Daya Mineral;

SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi
SKUP	:	Surat Kemampuan Usaha Penunjang
TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
ULP	:	Unit Layanan Pengadaan
UNCITRAL	:	United Nations Commission on International Trade Law
UMR	:	Upah Minimum Regional
UUD	:	Undang-Undang Dasar
UU	:	Undang-Undang
WPB	:	Working Planning and Budget
WTO	:	World Trade Organization

